



**TAJUK RENCANA**

## Relokasi PKL Malioboro

**PROSES** relokasi pedagang kaki lima (PKL) Malioboro sudah dimulai. Dua tempat yang disediakan, yaitu eks Gedung Bioskop Indra (namanya Teras Malioboro 1) dan eks Gedung Dinas Pariwisata DIY (Teras Malioboro 2), sudah diresmikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan HB X, Rabu (26/1). Artinya, kedua tempat relokasi tersebut memang sudah siap ditempati. Sedang pemindahan pedagang akan dilakukan secara bertahap, mengingat jumlah PKL Malioboro cukup banyak, yaitu 1.838 PKL.

Relokasi PKL merupakan bagian dari proses panjang penataan kawasan Malioboro. Menurut Gubernur DIY Sri Sultan HB X, pihaknya sudah menunggu sampai 18 tahun untuk melakukan relokasi PKL Malioboro. 18 tahun bukan waktu yang pendek. Karena itu meski ada sebagian PKL yang meminta agar relokasi ditunda sampai lebaran mendatang, bahkan juga mendatangi DPRD DIY, permintaan itu dengan berat tidak dipenuhi.

Bisa dimaklumi, setiap relokasi pedagang di mana saja pasti menimbulkan berbagai kekhawatiran. Termasuk kemungkinan akan turunnya omset penjualan. Tetapi itu merupakan sesuatu yang wajar terjadi. Memang perlu masa transisi. Tetapi setelah kondisi stabil, perolehan omsetpun akan pulih kembali, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk meningkat. Apalagi kalau relokasi dilakukan sekarang, saat libur lebaran mendatang diprediksi kondisi sudah stabil.

Terkait relokasi PKL Malioboro, Pemda DIY tampaknya juga melakukan berbagai antisipasi mengenai hal ini. Antara lain dengan membuat kebijakan membebaskan retribusi selama setahun. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Sri Nurkatsiwi, para PKL juga akan mendapatkan fasilitas kebutuhan primer seperti listrik, air, jaringan internet, tempat sampah serta diberikan lapak gratis.

Sementara itu untuk promosi, yang rencananya akan dilakukan bersama-

sama oleh pihak pemerintah, PKL dan pihak lain untuk mendatangkan pengunjung ke Teras Malioboro 1 maupun Teras Malioboro 2, kiranya tidak sulit. Sebab, Malioboro sudah menjadi ikon Yogya. Selain lokasinya di jantung kota, sudah tercipta *image* bahwa berkunjung ke Yogya tidak lengkap kalau tidak ke Malioboro. Dengan begitu, pengunjung Malioboro akan tetap banyak dan tinggal mengarahkan di mana tempat beli oleh-oleh atau pusat jajanan. Yang penting, citra baik ini jangan sampai dikotori, atau dirusak, misalnya ada yang memunguti biaya parkir, di luar kewajaran atau *nuthuk* ketika ada wisatawan belanja, sehingga membuat mereka *kapok*.

Di era digital saat ini, untuk melakukan promosi juga sangat mudah. Setiap PKL bisa mempromosikan sendiri-sendiri jenis usahanya, termasuk kelebihanannya sebagai daya tarik, melalui media sosial (medsos). Kita yakin para PKL Malioboro memiliki gadget yang mendukung untuk itu. Melalui HP android yang dimiliki, setiap saat mereka masing-masing bisa terus mengupdate informasi terkait dagangannya melalui medsos, bahkan juga bisa melakukan jual beli secara online. Sehingga untuk saat ini, tempat fisik berjualan sering dianggap sudah tidak begitu penting lagi. Meski memiliki tempat di lokasi tidak strategis, di tengah pemukiman misalnya, namun omset penjualannya bisa tetap tinggi.

Selasar Malioboro memang seharusnya tidak digunakan PKL untuk berjualan. Selasar dan Lorong-lorong tersebut juga bukan milik PKL, tetapi yang mempunyai pemilik toko dan Pemda DIY. Karena itu sudah semestinya kalau Pemda merelokasi PKL dari jalur pedestrian Malioboro. Yang penting, setelah semua direlokasi, pemilik toko jangan lantas memajang dagangannya di selasar tersebut. Selain itu juga harus ketat jangan muncul PKL baru di kawasan tersebut, jadi, trotoar di Malioboro nanti benar-benar difungsikan sebagaimana mestinya. □

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			
3. Kundha Kabudayan			

Yogyakarta, 04 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005